



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Pusat Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau Bandar Seri Kota Piring
Kawasan Perkantoran Sultan Mahmud Riyat Syah
Gedung Raja Abdul Rahman (Gedung D Lantai 1)
Pulau Dompok Seri Darul Makmur - Tanjungpinang
Website : bpsdm kepriprov.go.id Email : bpsdm@kepriprov.go.id Kode Pos 29124

BERITA ACARA HASIL FORUM KONSULTASI PUBLIK (FKP)
SEKTOR PELAYANAN : BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA (BPSDM)
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

Pada hari ini, Selasa, 14 Oktober 2025, telah dilaksanakan Forum Konsultasi Publik Sektor Pelayanan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Kepulauan Riau. Berdasarkan hasil diskusi dan keputusan bersama menyatakan sebagai berikut:

NO	Identifikasi Masalah	Usulan Rekomendasi Perbaikan	Jangka Waktu Penyelesaian
1.	Belum optimalnya keberlanjutan inovasi dari alumni Peserta PKA (Pelatihan Kepemimpinan Administrator) dan PKP (Pelatihan Kepemimpinan Pengawas) di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain: a. Keterbatasan anggaran untuk melanjutkan inovasi ke tahapan jangka menengah dan jangka Panjang. b. Kurangnya pendampingan dan perhatian dari mentor untuk terus mendukung inovasi yang telah dibuat alumni PKA dan PKP sebagai bentuk peningkatan pelayanan publik dan kinerja OPD. c. Minimnya publikasi digital dan diseminasi informasi oleh OPD terkait implementasi aksi perubahan alumni	a. BPSDM Provinsi Kepulauan Riau akan menyurati OPD peserta alumni PKA dan PKP yang ditandatangani Bapak Sekda Provinsi Kepulauan Riau agar setiap inovasi hasil aksi perubahan peserta PKA/PKP perlu diintegrasikan ke dalam Renstra, Renja, atau RKA OPD, agar memperoleh alokasi anggaran secara formal dan berkelanjutan. b. BPSDM Provinsi Kepulauan Riau akan menyurati OPD peserta alumni PKA dan PKP yang ditandatangani Bapak Sekda Provinsi Kepulauan Riau agar melakukan pendampingan berkala (triwulan atau semesteran) guna memantau perkembangan inovasi dan memberikan masukan teknis serta strategis.	Desember 2025

	PKA dan PKP, sehingga inovasi yang telah dilakukan kurang dikenal, tidak terdokumentasi dengan baik, dan tidak menjadi inspirasi bagi unit kerja lain.	c. BPSDM Provinsi Kepulauan Riau akan memfasilitasi Pelatihan <i>Government Transformation Academy (GTA)</i>	
2.	Belum terbangunnya sistem penghargaan berbasis kinerja atas inovasi yang dihasilkan oleh alumni PKA dan PKP.	a. BPSDM Provinsi Kepulauan Riau mengusulkan rekomendasi dari lulusan 3 besar PKA dan PKP ke BAPERJAKAT untuk dipertimbangkan kenaikan jenjang karir di atasnya. b. BPSDM Provinsi Kepulauan Riau mengusulkan rekomendasi dari lulusan 3 besar PKA dan PKP sebagai prioritas mengikuti pelatihan satu tingkat di atasnya. c. BPSDM merekomendasikan usulan 10 besar PKA/PKP untuk berkolaborasi dengan OPD lain terkait mendorong penciptaan inovasi yang merata.	Desember 2025
3.	Kurangnya koordinasi antara OPD terkait pengelolaan dan pendataan inovasi dari alumni PKA dan PKP sehingga inovasi yang dihasilkan masih ada yang belum tercatat dalam sistem inovasi daerah yang	BPSDM Provinsi Kepulauan Riau akan menyurati secara berkala setelah selesai pelatihan PKA dan PKP ke Barenlitbang dan Biro Organisasi Sekretariat Daerah agar seluruh hasil inovasi dari alumni pelatihan PKA dan PKP dapat	Desember 2025

	diselenggarakan oleh Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau (Barenlitbang) dan Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau.	terintegrasi dan diikutsertakan dalam Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) yang diselenggarakan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia dan ajang kompetisi penghargaan <i>Innovative Government Award (IGA)</i> dari Kementerian Dalam Negeri, untuk mewujudkan koordinasi yang efektif antar OPD dalam pengelolaan dan pendataan inovasi ASN Provinsi Kepulauan Riau.	
4.	Keterbatasan sarana dan prasarana pembelajaran, baik seperti belum tersedianya fasilitas asrama (akomodasi peserta) dan lemahnya koneksi jaringan internet asrama fisik maupun digital, menyebabkan pelaksanaan PKA dan PKP di BPSDM belum berjalan maksimal.	a. BPSDM Provinsi Kepulauan Riau akan melakukan kerja sama (MoU) dengan Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) dalam rangka pemanfaatan fasilitas asrama sebagai sarana pendukung pelaksanaan program pengembangan kompetensi, khususnya PKA dan PKP. Langkah ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan akomodasi peserta pelatihan, meningkatkan kenyamanan dan efisiensi pelaksanaan kegiatan. b. BPSDM Provinsi Kepulauan Riau akan mengajukan surat resmi kepada Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) untuk menjalin kerja sama dalam	Desember 2025

		penyediaan dan penguatan jaringan internet di lingkungan BPSDM, untuk meningkatkan dukungan infrastruktur digital dalam pelaksanaan pelatihan, pembelajaran berbasis daring, serta pengelolaan data dan administrasi yang lebih efisien. c. BPSDM Provinsi Kepulauan Riau akan mengusulkan penganggaran pembangunan asrama pelatihan. Langkah ini dilakukan untuk memperkuat sarana pendukung pelatihan dan pengembangan kompetensi ASN, serta menciptakan lingkungan belajar yang kondusif.	
5.	Pemanfaatan teknologi pembelajaran di BPSDM Provinsi Kepulauan Riau, seperti <i>Knowledge Management System (KMS)</i> dan <i>Learning Management System (LMS)</i> belum berjalan secara optimal. Kondisi ini menyebabkan transformasi digital dalam pengembangan kompetensi ASN belum sepenuhnya efektif.	BPSDM Provinsi Kepulauan Riau sedang mengembangkan aplikasi <i>Learning Management System (LMS)</i> yang diberi nama LIGAT Kepri (Aplikasi Ruang Belajar Aparatur Kepri) sebagai upaya untuk mengoptimalkan pemanfaatan teknologi pembelajaran digital. Melalui LIGAT Kepri, diharapkan proses pembelajaran ASN dapat berlangsung lebih fleksibel, terukur, dan terdokumentasi secara sistematis, serta mendukung transformasi digital dalam pengembangan kompetensi aparatur di	Desember 2025

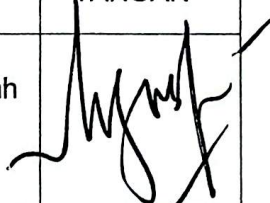
		lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.	
6.	Standar Pelayanan, Survey Kepuasan Masyarakat, Informasi Pelayanan belum terpublikasi dengan baik.	BPSDM rutin memberikan informasi atau publikasi kepada masyarakat melalui sosial media, website dan media lainnya.	Desember 2025

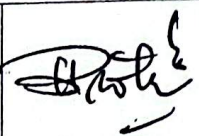
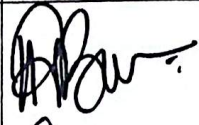
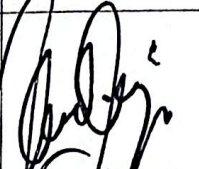
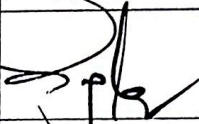
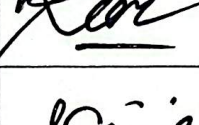
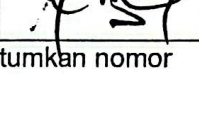
Pimpinan Unit Penyelenggara Pelayanan dapat menerima identifikasi masalah, usulan rekomendasi, jangka waktu dan berkomitmen menindaklanjuti rekomendasi perbaikan tersebut sebagai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.

Masyarakat dan *stakeholder* yang hadir akan melakukan pemantauan dan mengawasi progress tindak lanjut perbaikan yang dilakukan oleh Unit Penyelenggara Pelayanan sesuai usulan rekomendasi dan jangka waktu penyelesaian yang telah disepati bersama.

Demikian berita acara ini dibuat sebagaimana mestinya.

Tanjungpinang, 14 Oktober 2025

No	NAMA & NO HP*	JENIS KELAMIN (L/P)	PERWAKILAN	TANDA TANGAN*
1.	AGUSMAN, S (No HP. 0813-7240-1686)	L	Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah Dan KORPRI Provinsi Kepulauan Riau	
2.	Drs. MUHAMAD HANAFIAH (No HP. 0812-7793-9655)	L	Ka. UPT PPD Tanjungpinang Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau	
3.	HAZIRWAN (No HP. 0811-77-3160)	L	Fungsional Madya Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau	
4.	RIA HASTUTY (No HP.0813-6434-0370)	P	Kasubag UMPEG Badan Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Kepulauan Riau	

5.	AZIKA (No HP. 0812-8060-0299)	P	Kasubag UMPEG Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau	
6.	FHAIZAL B (No HP. 0812-7026-6643)	L	Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau	
7.	MUHAMMAD NAAJI (No HP. 0813-7224-3752)	L	Inspektorat	
8.	NELSON YANRY, S.Kom., S.H., M.M. (No HP. 0812-5152-7272)	L	Alumni Pelatihan Kepemimpinan Administrator Tahun 2024	
9.	MARDIANTI, S.E., M.A.P (No HP. 0811-704-034)	P	Alumni Pelatihan Kepemimpinan Administrator Tahun 2024	
10.	MUHAMMAD FADHLAL (No HP. 0813-6382-3457)	L	Alumni Pelatihan Kepemimpinan Pengawas Tahun 2024	
11.	RINA HERMAWATI (No HP. 0812-75553-033)	P	Alumni Pelatihan Kepemimpinan Pengawas Tahun 2024	
12.	SELAMET RIADI (No HP. 0813-7174-8827)	L	Stakeholder Penerima Layanan Inovasi	

*) Penandatanganan adalah masing-masing perwakilan dari Peserta FKP dan wajib mencantumkan nomor kontak/HP

KEPALA BIDANG
PENGEMBANGAN KOMPETENSI
MANAJERIAL DAN SOSIO KULTURAL


DONNY FIRMANSYAH, S.T., M.M.
Penata Tk. I (III/d)
NIP. 19801204 201001 1 013

KEPALA BADAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU,


ANY LINDAWATI, S.H., M.H.
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19721006 199803 2 014

*) Penandatanganan adalah Pimpinan Instansi dan Penyelenggara Pelayanan.